

Judul : Pembahasan Terancam Kembali Molor
Tanggal : Jumat, 17 November 2017
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

RUU ANTITERORISME

Pembahasan Terancam Kembali Molor

JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terancam kembali molor dari target akhir yang sudah ditentukan. Proses yang memakan waktu lama itu disebabkan pemerintah yang belum satu suara dalam menyikapi beberapa isu yang tersisa dalam RUU Antiterorisme.

Isu-isu yang dimaksud antara lain seputar pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme, penguatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selaku institusi yang berwenang mengoordinasikan upaya pemberantasan aksi teror, dan pembentukan dewan pengawasan terhadap lembaga yang melakukan upaya penanggulangan terorisme.

Anggota Panitia Khusus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Arsul Sani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11), mengatakan, salah satu penyebab molornya pembahasan adalah sikap dari pemerintah yang tak pernah sama. Misalnya, kepolisian dan TNI masih berbeda sikap dalam menyikapi isu pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme.

"Dari sisi DPR, kami berharap pemerintah bisa satu suara. Siapa yang harus satu suara? TNI, Polri, BNPT, dan semua lembaga terkait," kata Arsul.

Pansus RUU Antiterorisme telah bekerja selama sembilan kali

masa sidang sejak April 2016. Pansus sempat menargetkan pembahasan rampung pada akhir Oktober. Namun, karena pembahasan masih berkepanjangan, target itu mundur ke akhir Desember. Arsul sangsi pembahasan rampung sesuai target.

Berdasarkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib, pembahasan RUU di komisi atau pansus paling lama dilakukan tiga kali masa persidangan atau satu tahun sidang. Pansus dapat meminta perpanjangan waktu pembahasan sampai satu kali masa persidangan. Hingga kini, Pansus RUU Antiterorisme telah meminta perpanjangan hingga lima kali.

Ketua Pansus RUU Antiterorisme Muhammad Syafii mengatakan, pemerintah telah beberapa kali meminta rapat dengan DPR ditunda, salah satunya pada Kamis (16/11). "Pemerintah mengirim surat minta pengunduran jadwal karena masih butuh waktu untuk berkoordinasi," katanya.

Dengan pengunduran jadwal ini, rapat pembahasan RUU sudah tertunda hingga enam kali. Dengan kondisi itu, Syafii mengatakan, target RUU bisa dituntaskan pada masa sidang II DPR terancam tidak bisa dipenuhi.

"DPR sangat dirugikan dengan sikap pemerintah ini. DPR ingin RUU ini segera tuntas karena masih banyak RUU lain yang belum tuntas," tambahnya.

(APA/AGE)